

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bantul

1. Karakteristik Wilayah

a. Letak geografis

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai lima Kabupaten dan satu Kotamadya, salah satu kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bantul. Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 07°44'04" 08°00'27" Lintang Selatan dan 110°12'34" - 110°31'08" Bujur Timur. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.

2. Visi dan Misi

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul ditetapkan visi daerah, yaitu : "BANTUL PROJOTAMANSARI

SELAJUTERA DEMOKRATIS DAN AGAMIS"

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang adalah Bantul yang produktif profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis, yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi.

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional organisasi (Pemerintah) yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan bagi masa mendatang. Sebagai penjabaran dari Visi yang ditetapkan diatas, pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian Visi tersebut. Dengan adanya pernyataan Misi organisasi, maka akan dapat dijelaskan mengapa organisasi eksis dan apa maknanya pada masa yang akan datang.

Adapun Misi Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2011 - 2015 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik.
- Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan

- Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender.
- Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan

3. Semboyan

Semboyan Kabupaten bantul adalah PROJOTAMANSARI :

- **Produktif**

Dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah.

- **Profesional**

Dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi, agar mereka betul-betul matang dan ahli di bidangnya masing-masing. Tolak ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan.

- **Ijo Royo-Royo**

Dalam arti tidak ada sejengkal tanah pun yang ditelantarkan

akan tampak suasana yang rindang. Dalam hal ini perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa bagaimana pun Kabupaten Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh berkembangnya sektor industri yang kuat di masa mendatang.

- Tertib

Dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintah dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman pada sistem ketentuan hukum/ perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional.

- Aman

Dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

- Sehat

Dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat

- Asri

Dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras, dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan kerasan, asri tidak mewah tetapi lebih cenderung memanfaatkan potensi lingkungan yang berstandar pada kreativitas manusiawi.

- Sejahtera

Dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bantul telah terpenuhi secara lahir dan batin.

- Demokratis

Dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat, dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab.

- Agamis

Dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Bantul senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan dalam interaksi sosial sehari-

Data pegawai tahun 2013 sebanyak 11.330 PNS dengan perincian sebagai

berikut :

Tabel 1.1

Data Pegawai 2013

	Nama Lembaga	Jumlah
*	Sekretariat Daerah	4
*	Staf Ahli	5
1	Badan Kepegawaian Daerah	45
2	Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	88
3	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	95
4	Badan Lingkungan Hidup	41
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	51
7	Bagian Administrasi Pembangunan	24
8	Bagian Hubungan Masyarakat	19
9	Bagian Hukum	15
10	Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah	15
11	Bagian Organisasi	12
12	Bagian Pemerintahan Desa	18
13	Bagian Protokol	15
14	Bagian Tata Pemerintahan	16

15	Bagian Umum	80
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	105
17	Dinas Kelautan Perikanan & Peternakan	61
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	67
19	Dinas Kesehatan	1.049
20	Dinas Pekerjaan Umum	193
21	Dinas Pendidikan Dasar	4.917
22	Dinas Pendidikan Menengah dan Non formal	2.435
23	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	127
24	Dinas Perhubungan	72
25	Dinas Perijinan	36
26	Dinas Perindustrian Perdagangan & Koperasi	67
27	Dinas Pertanian dan Kehutanan	157
28	Dinas Sosial	36
29	Dinas Sumber Daya Air	99
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	76
31	Inspektorat	42
32	Kantor Arsip	16
33	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	20
34	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa	31

35	Kantor Pemuda dan Olah Raga	14
36	Kantor Pengelolaan Pasar	103
37	Kantor Pengolahan Data Telematika	20
38	Kantor Perpustakaan	28
39	Kecamatan Bambanglipuro	23
40	Kecamatan Banguntapan	34
41	Kecamatan Bantul	27
42	Kecamatan Dlingo	23
43	Kecamatan Imogiri	22
44	Kecamatan Jetis	27
45	Kecamatan Kasihan	29
46	Kecamatan Kretek	22
47	Kecamatan Pajangan	22
48	Kecamatan Pandak	27
49	Kecamatan Piyungan	27
50	Kecamatan Pleret	22
51	Kecamatan Pundong	23
52	Kecamatan Sanden	24
53	Kecamatan Sedayu	27
54	Kecamatan Sewon	26

55	Kecamatan Srandakan	21
56	RSUD Panembahan Senopati	449
57	Satuan Polisi Pamong Praja	65
58	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	46
59	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	5

Dalam jumlah CPNS dan PNS pada tahun 2013 sebanyak 11.330, jika dilihat secara lintas, maka terlalu banyak jumlah yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bantul. Pada hal ini dari jumlah yang banyak, sebenarnya sangat kuraang jika dihitung per setiap lembaga yang ada. jumlah CPNS dan PNS yang paling banyak pada tahun 2013 adalah Dinas Pendidikan Dasar sejumlah 4.917. Dari jumlah itu banyak diantaranya adalah tenaga guru dasar.

B. Gambaran Tentang Inspektorat Kabupaten Bantul

1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bantul

Tugas Inspektorat Kabupaten Bantul seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Sedangkan Untuk

- a. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur, pembangunan perekonomian, kesejahteraan sosial, serta pengurusan pendapatan dan kekayaan daerah dan desa.
- b. Pelaksanaan pengujian, penilaian monitoring dan evaluasi atas hasil setiap unsur dan kegiatan instansi perangkat Daerah dan Desa.
- c. Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan dan pengaduan terhadap adanya penyimpangan atau penyalahgunaan tugas dan wewenang perangkat Daerah dan Desa.
- d. Pelaksanaan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Pengawasan Internal dan eksternal
- e. Penyelenggaraan rumah tangga dan kesekretariatan Badan

2. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

2.1. Visi dan Misi

Visi Inspektorat Kabupaten Bantul adalah merupakan cita-cita yang menggambarkan akan dibawa kemana Inspektorat Kabupaten Bantul di masa mendatang dan visi selalu berpijak pada kondisi, potensi, tantangan dan hambatan yang ada. Sehubungan dengan analisis dan pendalaman tersebut, maka ditetapkanlah visi Inspektorat Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya pengawasan yang berkualitas sebagai penjamin mutu

guna pencapaian Bantul Progres, Transparansi, Demokratis dan Agamis”

Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan persyaratan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.

Dari gambaran tersebut maka ditetapkan misi Inspektorat Kabupaten Bantul adalah Mengoptimalkan pengawasan dalam rangka pencapaian transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah merupakan target yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Dengan memperhitungkan faktor-faktor lingkungan strategik, serta upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, Inspektorat mempunyai tujuan mendorong tercapainya peningkatan transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi

Sasaran mengungkapkan tugas-tugas spesifik yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Adapun sasaran yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul adalah

a. Meningkatkan transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Bantul didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Sumber Daya Manusia di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

No	Jab. Struktural/ Jab. Fungsional	Jumlah
1	Inspektur	1
2	Sekretaris	1
3	Urban Bid. Pemerintahan	1
4	Urban Bid. Kesos	1
5	Urban Bid. Perekonomian	1
6	Urban Bid. Keuangan dan Aset	1
7	Ka Sub Bag. Umum, Kepeg & Keu	1
8	Ka Sub Bag. Evlap	1
9	Ka Sub Bag. Perencanaan	1
10	Pengendali Teknis (Auditor)	4
11	Ketua Tim (Auditor)	8
12	Anggota Tim (Auditor)	5
13	Staf Bidang	6

14	P2UPD	1
15	Staf Sekretariat	9
	Jumlah	42

Sumber : Inspektorat Bantul

Adapun dalam mendukung kegiatan tugas sehari – hari Inspektorat Kabupaten Bantul memiliki sarana / prasarana meliputi fasilitas, sebagai berikut:

Tabel 1.3

Kantor dan Perlengkapan Kantor

No	Jenis fasilitas	Keterangan
1	Kantor Inspektorat	Baik
2	Ruang Rapat	Baik
3	Musholla	Baik
4	Meja Kerja	Baik
5	Kursi kerja / kursi tamu	Baik
6	Kursi rapat	Baik
7	Papan data	Baik
8	Papan kegiatan	Baik
9	Kamar mandi	Baik
10	Komputer	Baik
11	Laptop/Notebook	Baik
12	Printer	Baik

13	Televisi	Baik
14	Pesawat telepon	Baik
15	Pesawat HT	Baik
16	Mesin ketik	Baik
17	Filling Cabinet	Baik
18	Rak arsip	Baik
19	Lemari kayu	Baik
20	Lemari besi	Baik

Sumber : Inspektorat

Tabel 1.4

Kendaraan Roda 4 dan Roda 2

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	Toyota Kijang	3
2	Suzuki APV	1
3	Mitsubishi	2
4	Sepeda motor	14

Sumber : Inspektorat Kabupaten bantul

Dokumen perencanaan strategis (Renstra) sangat bermanfaat dan diperlukan terutama untuk :

- Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan

- Pemilihan kebijakan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan.
- Memberikan komitmen pada aktivitas kegiatan operasional pengawasan.
- Mendorong Peningkatan pelayanan publik.
- Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan.

Dengan demikian, perencanaan strategis disusun melalui proses secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan terutama dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektifitas organisasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, serta mampu eksis dalam mengantisipasi kondisi tersebut, setiap organisasi Pemerintah khususnya Organisasi Perangkat Daerah perlu menyusun perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik Daerah, nasional maupun global

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, maka suatu organisasi perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011 - 2015 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Rencana Strategis pada dasarnya merupakan proses

Inspektorat Kabupaten Bantul sebagai organisasi Perangkat Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam mendorong terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Bantul, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011-2015 sangatlah diperlukan. Renstra tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul pada periode tahun 2011-2015

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

4.1. Tantangan

- a. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- b. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait
- c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah
- d. Masih adanya pejabat memandang pengawasan sebagai wahana mencari kesalahan dan belum memandang sebagai fungsi manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi
- e. Dinamika perubahan manajemen birokrasi pemerintah masih berorientasi pada membenahan aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, membenahan sistem pengawasan masih tertinggal
- f. *Reward* kepada tenaga fungsional auditor belum memadai yang

...kualitasnya menyangkut aspek dan menuntut profesionalisme.

- a. *Political will* pemerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan baik daerah maupun nasional
- b. Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) yang strategis
- c. Perubahan paradigma pengawasan, dimana aparat pengawasan sebagai mitra auditi (*Consultant partner*)
- d. Semakin meningkatnya transparansi masyarakat sejalan dengan era demokratisasi
- e. Komitmen tinggi dari pimpinan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN dalam rangka terciptanya *good governance*

5. Strategi dan Arah Kebijakan

5.1. Analisis Lingkungan Strategik (ALS)

Diperlukan adanya analisis lingkungan strategik guna mengetahui kondisi internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi kinerja organisasi dalam mencapai tujuan. Untuk keperluan analisis dipergunakan model analisis SWOT/KEKEPAN. Analisis lingkungan internal (ALI) akan menghasilkan gambaran tentang kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) sedangkan analisis lingkungan eksternal

(ALE) akan memperoleh gambaran peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*).

5.2. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

5.2.1. Kekuatan

- SDM Aparat Pengawasan telah memiliki sertifikat Auditor
- Adanya pedoman pengawasan
- Adanya Kode Etik Auditor
- Adanya Majelis Kode Etik

5.2.2. Kelemahan

- SDM pengawasan dan auditor banyak yang segera memasuki usia pensiun
- Dukungan anggaran dan sarana/prasarana kerja belum memadai
- Implementasi audit sesuai PKA dan KKA belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Auditor
- Terbatasnya kesempatan Auditor mengikuti diklat peningkatan kemampuan teknis dan kompetensi substansi

5.3. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

5.3.1. Peluang

- *Political will* pemerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalam sistem

- Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) yang strategis
- Perubahan paradigma pengawasan, dimana aparat pengawasan sebagai mitra auditi (*Consultant partner*)
- Semakin meningkatnya transparansi masyarakat sejalan dengan era demokratisasi
- Komitmen tinggi dari pimpinan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN dalam rangka terciptanya *good governance*

5.3.2. Ancaman

- Masih adanya pejabat memandang pengawasan sebagai wahana mencari kesalahan dan belum memandang sebagai fungsi manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi
- Dinamika perubahan manajemen birokrasi pemerintah masih berorientasi pada pembenahan aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pembenahan sistem, pengawasan masih tertinggal
- *Reward* kepada tenaga fungsional auditor belum memadai yang pekerjaannya mengandung resiko dan menuntut profesionalisme

Asumsi adalah kesimpulan tentang faktor-faktor lingkungan serta dampaknya terhadap masa depan organisasi. Berdasarkan analisis lingkungan stratejik tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- Dengan kewenangan yang dimiliki didukung oleh kebijakan Pimpinan Daerah yang kondusif, serta dedikasi dan kekompakan aparat, maka melalui pengawasan yang profesional diharapkan dapat diwujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan pelayanan masyarakat yang prima.
- Keterbatasan kompetensi aparat, dana, sarana dan prasarana serta jumlah obyek pemeriksaan yang banyak dapat menghambat upaya untuk mewujudkan komitmen pemerintah dan harapan masyarakat.
- Adanya komitmen Pemerintah Daerah dan kesempatan yang luas dalam upaya peningkatan kompetensi aparat, akan mendorong Inspektorat menjadi lembaga pengawasan internal yang profesional.
- Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran instansi dan masyarakat akan pentingnya pengawasan dan prosedur kerja.

5.3.4. Isu Strategis

Adapun metoda yang digunakan dalam menentukan Isu-isu

1. Metode Interaksi Antara Faktor *Strengths* dengan faktor *Opportunities* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Metode Interaksi Antara Faktor *Strengths* dengan faktor *Threats* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
3. Metode Interaksi Antara Faktor *Weaknesses* dengan factor *Opportunities* dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Atau manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.
4. Metode Interaksi. Antara Faktor *Weaknesses* dengan faktor *Threats* dengan prinsip minimalkan kelemahan dan hindari ancaman.

Melalui metoda diatas Inspektorat Kabupaten Bantul menetapkan isu strategis:

1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
3. Mewujudkan inspektorat sebagai *Counsultant Partner*.
4. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.

6. Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang memuat

rencana capaian indikator sasaran program dan capaian indikator

kegiatan. Adapun RKT Inspektorat Kabupaten Bantul tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2013

NO	SASARAN				
	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	2013	
				Target	
1	Meningkatnya kapasitas	1	Peningkatan Disiplin Kerja		
	dan profesionalisme		- Aparat Desa	%	100
	aparatur pemerintahan		- Aparat PNS	%	100
	daerah dan desa serta				
	lembaga pemerintah				
2	Meningkatnya Transparansi	1	Turunnya indikasi	LHP	238
	efektifitas dan efisiensi		penyimpangan anggaran		
	Birokrasi		Pembangunan		
		2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SKPD : Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	SKPD	25

		3	Temuan Pemeriksaan	%	100
			eksternal yang selsai di		
			Tindaklanjuti		
		4	Temuan Pemeriksaan	%	100
			internal yang selsai di		
			Tindaklanjuti		

Sumber : Rencana Kinerja Inspektorat Bantul 2013

7. Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan adalah faktor yang sangat berpengaruh yang menentukan keberhasilan/kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan. Setelah dilakukan analisis strategik dan pilihan dapat dirumuskan faktor penentu keberhasilan sebagai berikut :

- Peran serta Instansi pemerintah serta masyarakat dalam pengawasan , akan miningkatkan keberhasilan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

7.1. Strategi

Guna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi, dengan mendasarkan hasil analisis lingkungan

... strategi kebijakan yang akan ditempuh adalah

meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi, pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan

7.2. Arah Kebijakan

Adapun kebijakan yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul adalah mengembangkan pengawasan dalam rangka peningkatan pembangunan daerah.

8. Program dan Kegiatan

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

8.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan utamanya adalah sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
- Penyediaan Jasa Keamanan

8.2.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan

utamanya adalah sebagai berikut :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

8.3.Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan utamanya adalah

sebagai berikut :

- Pembinaan Disiplin Aparatur/Ceking Jam Kerja

8.4.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan

utamanya adalah sebagai berikut :

- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
- Pendidikan dan Pelatihan Teknis

8.5.Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan utamanya adalah

sebagai berikut :

- Pengawasan Reguler
- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- Penanganan Kasus/Pengaduan

- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
- Percepatan Pemberantasan KKN
- Review Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda
- Pemutakhiran Data
- Evaluasi Kinerja Instansi
- Koordinasi Penyusunan PKPT (Program Kerja Pengawasan)
- Fasilitasi Pelaksanaan SPIP di Kabupaten Bantul
- PMPRB Online
- Penyusunan Pedoman Pengawasan
- Fasilitasi FORPI

9. Objek SKPD

Objek pengawasan Inspektorat Kabupaten Bantul, meliputi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul, dan Pemerintahan Desa, Sebagai berikut :

9.1. Sekretaris Daerah

- a. Bagian Hukum
- b. Bagian Tata Pemerintah
- c. Bagaimana Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah
- d. Bagian Administrasi Pembangunan
- e. Bagian Hubungan Masyarakat
- f. Bagian umum

g. Bagian Protokol

h. Bagian Organisasi

9.2. Sekretaris DPRD

9.3. Dinas Daerah

i. Dinas Kesehatan

ii. Dinas Pendidikan Dasar

iii. Dinas Pendidikan Menengan dan Non Formal

iv. Dinas Sosial

v. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

vi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

vii. Dinas Perhubungan

viii. Kebudayaan dan Kepariwisata

ix. Dinas Keuangan dan Aset Daerah

x. Dinas Pekerjaan Umum

xi. Dinas Sumber Daya Air

xii. Dinas Pertanian dan Kehutanan

xiii. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan

xiv. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi

xv. Dinas Perizinan

9.4. Lembaga Tehnis Daerah

a. Badan Kepegawaian Daerah

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

c. Badan Lingkungan Hidup

- d. Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- e. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- g. Rumah Sakit Umum Daerah Penembahan Senopati
- h. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa
- i. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan masyarakat
- j. Kantor Perpustakaan Umum
- k. Kantor Arsip
- l. Kantor Pengelolaan Pasar
- m. Pemuda dan Olah Raga
- n. Kantor Pengelolaan data Telematika

9.5. Kecamatan

- a. Kecamatan Srandakan
- b. Kecamatan Sanden
- c. Kecamatan Pandak
- d. Kecamatan Sedayu
- e. Kecamatan Kasihan
- f. Kecamatan Pajangan
- g. Kecamatan Kretek
- h. Kecamatan Pundong
- i. Kecamatan Bambangliporo

- k. Kecamatan Sewon
- l. Kecamatan Jetis
- m. Kecamatan Pleret
- n. Kecamatan Imogiri
- o. Kecamatan Dlingo
- p. Kecamatan Bangun Tapan
- q. Kecamatan Piyungan

9.6. Satuan Polisi Pamong Praja

9.7. Unit Peaksanaan Tehnis Daerah

- a. Puskesmas Bantul I
- b. Puskesmas Bantul II
- c. Puskesmas Sewon I
- d. Puskesmas Sewon II
- e. Puskesmas Kasihan I
- f. Puskesmas Kasihan II
- g. Puskesmas Sedayu I
- h. Pukesmas Sedayu II
- i. Puskesmas Pajangan
- j. Puskesmas Pandank I
- k. Puskemmas Pandak II
- l. Puskesmas Srandakan
- m. Puskesmas Sanden

- o. Puskesmas Bambangliporo
- p. Puskesmas Imogiri I
- q. Puskesmas Imogiri II
- r. Puskesmas Jetis I
- s. Puskesmas Jetis II
- t. Puskesmas Pleret
- u. Puskesmas Piyungan
- v. Puskesmas Banguntapan I
- w. Puskesmas BangunTapan II
- x. Puskesmas Bangun Tapan III
- y. Puskesmas Dlingo I
- z. Puskesmas Dlingo II

9.8. Pasar

- a. Pasar Bantul
- b. Pasar Niten
- c. Pasar Imogiri
- d. Pasar Jogog (Pasar Hewan Pandak, Pasar Gatak, Pasar gesikan)
- e. Pasar Semimir (Pasar Sungapan)
- f. Pasar Mangiran (Pasar Gulungan, Pasar Sobaran, Pasar Koripaan,
Pasar Jragan)
- g. Pasar Imogiri (Pasar Hewan Imogiri)
- h. Pasar Dlingo (Pasar Teknik)

- i. Pasar Turi (Pasar Angkursari, Pasar Celep, Pasar Sangeh, Pasar Grogol)
- j. Pasar Jejeran (Pasar Pleret, Pasar Ngipik Lor)
- k. Pasar Piyungan (Pasar Panasan)
- l. Pasar Pundong (Pasar Bendosari, Pasar Barogan)

9.9. Badan Usaha Milik Daerah

- a. PD. BPR Bank Bantul
- b. PD. Aneka Dharma
- c. PDAM

9.10. Pemerintahan Desa

1. Desa Poncosari
2. Desa Trimurti
3. Desa Gading Sari
4. Desa Gadingharjo
5. Desa Murtigading
6. Desa Srigading
7. Desa Gilangharjo
8. Desa Wijirejo
9. Desa Triharjo
10. Desa Caturharjo
11. Desa Sendangsari
12. Desa Guwosari
13. Desa Triwidadi

14. Desa Argodadi
15. Desa Argosari
16. Desa Argorejo
17. Desa Argumulyo
18. Desa Tamantirto
19. Desa Tirtonirmolo
20. Desa Ngastiharjo
21. Desa Bangunjiwo
22. Desa Bangunharjo
23. Desa Panggungharjo
24. Desa Pendowoharjo
25. Desa Timbulharjo
26. Desan Bantul
27. Desa Ringinharjo
28. Desa Palbapang
29. Desa Tirenggo
30. Desa Sabdodadi
31. Desa Patalan
32. Desa Candan
33. Desa Trimulyo
34. Desa Sumberragung
35. Desa Seloharjo
36. Desa Srihardono

37. Desa Panjang Rejo

38. Desa Parangtritis

39. Desa Tirtohargo

40. Desa Tirtomulyo

41. Desa Tirtosari

42. Desa Donotirto

43. Desa Mulyodadi

44. Desa Sidomulyo

45. Desa Sumbermulyo

46. Desa Selopamiro

47. Desa Sriharjo

48. Desa Wukirsari

49. Desa Imogiri

50. Desa Karangtenga

51. Desa Karangtelun

52. Desa Kebonagung

53. Desa Girirejo

54. Desa Banguntapan

55. Desa Baturetno

56. Desa Potorono

57. Desa Jambidan

58. Desa Wirokerten

59. Desa Temoran

60. Desa Singosaren
61. Desa Jagalan
62. Desa Wonokromo
63. Desa Pleret
64. Desa Segoroyoso
65. Desa Bawuran
66. Desa Wonolelo
67. Desa Srimulyo
68. Desa Sitimulyo
69. Desa Srimartani
70. Desa Jatimulyo
71. Desa Mangunan
72. Desa dlingo
73. Desa Terong
74. Desa Muntuk
75. Desa Temuhun

9.11.Sekolah

1. SMA Negri 1 Bantul
2. SMA Negri 2 Bantul
3. SMA Negri 3 bantul
4. SMA Negri 1 Kasihan

6. SMA Negri 1 Sewon
7. SMA Negri 1 Pajangan
8. SMA Negri 1 Srandakan
9. SMA Negri 1 Sanden
10. SMA Negri 1 Kretek
11. SMA Negri 1 Babanglipuro
12. SMA Negri 1 Pundong
13. SMA Negri 1 Imogori
14. SMA Negri 1 Jetis
15. SMA Negri 1 Pleret
16. SMA Negri 1 Piyungan
17. SMA Negri 1 Banguntapan
18. SMA Negri 2 Banguntapan
19. SMA Negri 1 Dlingo
20. SMK Negri 1 Bantul
21. SMK Negri 1 Kasihan
22. SMK Negri 2 Kasihan
23. SMK Negri 3 Kasihan
24. SMK Negri 1 Pandak
25. SMK Negri 1 Sedayu
26. SMk Negri 1 Sanden
27. SMK Negri 1 Sewon
28. SMK Negri 2 Sewon

29. SMK Negri 1 Dlingo
30. SMK Negri 1 Pajangan
31. SMK Negri 1 Pundong
32. SMK Negri 1 Pleret
33. SMP Negri 1 Bantul
34. SMP Negri 2 Bantul
35. SMP Negri 3 Bantul
36. SMP Negri 1 Sewon
37. SMP Negri 2 Sewon
38. SMP Negri 3 Sewon
39. SMP Negri 4 Sewon
40. SMP Negri 1 Kasihan
41. SMP Negri 2 Kasihan
42. SMP Negri 3 Kasihan
43. SMP Negri 1 Sedayu
44. SMP Negri 2 sedayu
45. SMP Negri 1 Pajangan
46. SMP Negri 2 Pajangan
47. SMP Negri 3 Pajangan
48. SMP Negri 1 Pandak
49. SMP Negri 2 Pandak
50. SMP Negri 3 Pandak

52. SMP Negri 1 Srandakan
53. SMP Negri 2 Srandakan
54. SMP Negri 1 Sanden
55. SMP Negri 2 Sanden
56. SMP Negri 1 Kretek
57. SMP Negri 2 Kretek
58. SMP Negri 1 Bambanglipuro
59. SMP Negri 2 Bambanglipuro
60. SMP Negri 1 Pundong
61. SMP Negri 2 Pundong
62. SMP Negri 1 Imogiri
63. SMP Negri 2 Imogiri
64. SMP Negri 3 Imogiri
65. SMP Negri 1 Jetis
66. SMP Negri 2 Jetis
67. SMP Negri 3 Jetis
68. SMP Negri 1 Pleret
69. SMP Negri 2 Pleret
70. SMP Negri 3 Pleret
71. SMP Negri 1 Piyungan
72. SMP Negri 2 Piyungan
73. SMP Negri 1 Banguntapan

75. SMP Negri 3 Banguntapan
76. SMP Negri 4 bangun Tapan
77. SMP Negri 5 Bangun Tapan
78. SMP Negri 1 Dlingo
79. SMP Negri 2 Dlingo

9.12. Instansi lain diluar Pemerintah Daerah

1. Sekretaris KPU Kabupaten bantul
2. Sekretaris KORPRI

9.13. Sekolah Dasar

Dari seluruh Objek pengawasan, maka perlu banyak SDM yang akan mengawasi seluruh lembaga tersebut, hal ini dikarenakan untuk menjadikan lembaga atau pegawai yang memang benar – benar berkualitas.

10. Sruktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bantul

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bantul sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bantul

